

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh adanya regulasi, pembagian tugas pelaksana, komunikasi kebijakan, penyediaan sumber daya, serta kegiatan pengawasan dan pengendalian di lapangan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap aturan parkir, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, serta tingginya aktivitas kendaraan pada kawasan wisata yang memerlukan pengawasan lebih intensif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir masih perlu diperkuat melalui peningkatan komunikasi, optimalisasi sumber daya pelaksana, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tujuan kebijakan dalam menciptakan pengelolaan parkir yang tertib, aman, dan efektif di Kabupaten Pangandaran dapat tercapai.

2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Faktor pendukung berupa adanya komitmen dan tanggung jawab pelaksana, dukungan regulasi sebagai pedoman kerja, koordinasi antarpetugas, serta mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat menjadi kekuatan dalam menjalankan pengelolaan parkir agar lebih tertib dan terarah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan jumlah petugas, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan anggaran, belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap aturan parkir, serta tingginya aktivitas kendaraan di kawasan wisata Kabupaten Pangandaran.
3. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dilakukan melalui peningkatan kualitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan, penguatan kapasitas sumber daya pelaksana, optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga berusaha membangun pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat agar pengelolaan parkir dapat berjalan lebih tertib dan efektif. Peningkatan komunikasi dilakukan melalui penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat, sementara penguatan sumber daya dilakukan melalui peningkatan kemampuan petugas, pemenuhan sarana

prasarana, dan dukungan operasional. Selain itu, pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan kepatuhan terhadap aturan parkir.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran sebaiknya meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir melalui penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan sistem pengawasan secara rutin, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung di lokasi parkir. Selain itu, meningkatkan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan agar hambatan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti, serta mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan wisata, dan masyarakat dalam menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib dan berkelanjutan.

2. Saran bagi Pegawai Dinas Perhubungan

Pegawai Dinas Perhubungan sebaiknya meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengelolaan parkir, terutama dalam memberikan pelayanan yang ramah dan komunikatif kepada masyarakat. Selain itu, petugas sebaiknya meningkatkan koordinasi antarpegawai, melakukan pengawasan secara konsisten di lapangan, serta

memberikan edukasi secara persuasif kepada pengguna kendaraan agar kepatuhan terhadap aturan parkir dapat meningkat.

3. Saran bagi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Pangandaran sebaiknya lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan tempat parkir dengan menggunakan lokasi parkir yang telah ditentukan, mengikuti arahan petugas, serta menjaga ketertiban fasilitas parkir yang tersedia. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan karena keberhasilan kebijakan pengelolaan parkir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan bersama agar tercipta lingkungan parkir yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna layanan.

4. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya peneliti lain melakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel yang diteliti sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kesempurnaan hasil penelitian ini karena peneliti mengalami berbagai hambatan dalam proses penelitian.